



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**UNIT KERJA** : DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HIDAYAT SYAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 155719

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.791.799.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 359 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.560.455.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 729 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000		
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 652.800.000		
4. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 758.544.000		
5. Tanah Seluas 311 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 220.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>400.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>3</b>
<b>D. SURAT BERTAGIH</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.797.069.944</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.988.868.947</b>



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.988.868.947

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.